

Yusni

Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi

Yusni

Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

Email: buliayusni@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Banggai. Pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin dengan jumlah sampel yaitu 132 orang. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku pengadaan barang/jasa di tiap tiap OPD. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sistem internal pemerintah memoderasi *e-procurement* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata Kunci: *Implementasi e-procurement; Komitmen organisasi, Sistem pengendalian internal pemerintah, Pencegahan fraud*

Pendahuluan

Pemerintah pusat dan daerah mendapatkan amanat untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berwenang memungut berbagai jenis pendapatan dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara di tingkat pusat ataupun daerah, dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat, melalui proses pengadaan barang/jasa. Sehingga oleh instansi pemerintah mendukung kegiatan oprasional guna mewujudkan pembangunan merupakan aktivitas yang sangat penting.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana regulasi ini sudah beberapa kali disempurnakan agar bertujuan menghasilkan barang/jasa yang memiliki kualitas serta dapat terhindar dari kecurangan dan dapat bermanfaat optimal untuk negara bagi pembangunan. Agar pemerintah atau organisasi perangkat daerah bisa berjalan baik, efektif dan efisien perlu dilaksanakan pencegahan kecurangan/*fraud*, terutama pada sektor pengadaan barang/jasa, karena kecurangan sering terjadi di sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Alexander Marwata selaku wakil ketua KPK yang menuturkan sebagian besar kasus korupsi atau 80 persennya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Kecurangan/*fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi beberapa kasus di Kabupaten Banggai, hal ini diungkapkan oleh Mukri selaku kepala pusat penerangan hukum

kejaksaan agung, ia menuturkan tim Kejaksaan Negeri Banggai mengamankan penyedia barang direktur CV. KCM yang menjadi buronan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi pengadaan hand traktor G1000 sebanyak 5 unit dengan merk Kubota pada dinas pertanian Kabupaten Banggai TA.2013 untuk Desa Bantayan dan Desa Indang Sari. Kecurangan lain juga terjadi dimana Kejari Luwuk menetapkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi hutan dan lahan tahun anggaran 2011 nilai proyek kurang lebih 900 juta. Hal ini disampaikan M Sjarifuddin, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk, kepada tim redaksi website kejaksaan RI.

Dari kasus tersebut menggambarkan bahwa efektifitas pencegahan kecurangan pada pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banggai masih belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. Maka dibutuhkan perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan prinsip dasar proses pengadaan yaitu keterbukaan, tidak diskriminatif pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk itu agar mencegah kecurangan/*fraud* maka dibutuhkan suatu sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), yang saat ini Pemerintah Kabupaten Banggai sudah menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yaitu *e-procurement* karena *e-procurement* merupakan website sistem pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan sarana informasi, teknologi dan komunikasi berbasis internet (Sutedi, 2012), sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa bisa dilakukan tanpa ada pertemuan langsung dan lebih transparansi.

Menurut Jasin (2010) melalui *e-procurement* merupakan cara terbaik untuk mencegah sebab terjadinya kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian yang dilakukan Akbar (2019), Sulaeman (2016), Nuryanti (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa adanya pengaruh signifikan implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Romaissah (2019) implementasi *e-procurement* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Komitmen organisasi merupakan komitmen yang tercipta dari semua individu yang menjalankan oprasional organisasi. Pegawai yang berkomitmen pada organisasinya maka akan mengerti bahwa tujuan bekerja adalah untuk kepentingan organisasi, dengan hal ini maka komitmen organisasi bisa mempengaruhi kecurangan yang dilakukan pegawai. Semakin besar komitmen pegawai pada organisasinya, dapat menekan tindakan kecurangan pada organisasi tersebut (Kurniawan, 2011). Penelitian yang dilakukan, Purwitasari (2014) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian Sularso (2015), yang mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan/*fraud* pengadaan barang/jasa.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderasi, karena menurut Tuanakotta dalam Akbar (2019) sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran yang sangat penting terhadap pencegahan *fraud*. SPIP sangat berperan dalam hal mengontrol dan mengawasi terhadap kebijakan dan aturan yang diterapkan pada sebuah organisasi terutama pada sistem yang telah diterapkan. Karena sistem pengendalian internal adalah instrumen pemerintah yang memperoleh job desk untuk mengontrol kegiatan sektor publik. Sistem pengendalian internal yang tergolong baik dan kuat akan menghasilkan manajemen yang baik dalam menghadapi berbagai tindakan kecurangan sehingga tingkat kecurangan yang ada bisa diminimalisir. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitadewi (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal dapat memoderasi terjadinya kecurangan. Tetapi penelitian Firnanda (2019) mengungkapkan bahwa variabel pengendalian internal tidak memoderating kecurangan. Penelitian ini meneliti tentang implementasi *e-procurement* dan

komitmen organisasi mempengaruhi pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa, dan juga ingin mengetahui moderasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian kali ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan yaitu :

antara lain (1) Mengetahui secara deskripsi implementasi e-procurement, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan pencegahan *fraud* di Kabupaten Banggai. (2) Menganalisis pengaruh implementasi e-procurement dan komitmen terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada pemerintah. (3) Menganalisis mengenai sistem pengendalian internal pemerintah memoderasi hubungan implementasi e-procurement dan komitmen organisasi dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Implementasi *e-procurement* sangat diperlukan karena dengan *e-procurement* yang diterapkan pada pengadaan barang/jasa dapat meminimalisir kecurangan karena dengan sistem ini pengadaan barang/jasa lebih transparan dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan tawaran yang rasional, tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Teori *triangle fraud* menjelaskan penyebab *fraud* karena adanya kesempatan (*Opportunity*) yang disebabkan oleh sistem yang memberi lubang terjadinya kecurangan, dengan sistem pengawasan yang tidak ketat dan lemah, sehingga orang asal-asalan dalam bekerja dan memanipulasi angka, bebas melakukan kecurangan sehingga kecurangan makin meningkat. Teori *triangle fraud* berpendapat agar mencegah *fraud* dapat diterapkan sistem yang efektif yaitu dengan mengimplementasikan sistem berbasis elektronik pada organisasi, yaitu menerapkan sistem *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa dan memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

E-procurement adalah pendekatan terbaik yang bisa diterapkan untuk melakukan pencegahan kecurangan dalam hal pengadaan barang dan jasa pada pemerintah (Jasin, 2010). Mendukung pernyataan tersebut, Akbar (2019) dan Sulaeman (2016) membuktikan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan uraian itu maka hipotesis penelitian yang dapat diusulkan yaitu:
H₁: Implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak terlepas dari keberhasilan pegawai (sumberdaya manusia) yang dimiliki, sehingga sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi perlu memiliki komitmen terhadap organisasinya (Irawati, dkk. 2021). Komitmen organisasi merupakan komitmen yang tercipta dari semua individu yang menjalankan operasional organisasi. Pegawai yang berkomitmen pada organisasinya maka akan memahami bahwa tujuan bekerja adalah untuk kepentingan organisasi, dengan hal ini maka komitmen organisasi bisa mempengaruhi kecurangan yang dilakukan pegawai. Semakin besar komitmen pegawai pada organisasinya, dapat menekan tindakan kecurangan pada organisasi tersebut (Kurniawan, 2011). Teori *triangle fraud* juga menjelaskan penyebab lain munculnya keinginan untuk melakukan kecurangan yakni faktor *pressure* dan *retionalization* berdasarkan teori ini maka komitmen organisasi dapat mengurangi kecurangan, karena apabila pegawai berkomitmen terhadap organisasinya, apapun yang menjadi masalah internal dalam dirinya seperti sikap rasionalisasi, tekanan akan kebutuhan maka akan dapat dicegah dengan komitmen terhadap organisasi yang ada dalam dirinya. Hal ini didukung oleh penelitian Purwitasari (2014) dalam penelitiannya komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis penelitian yang dapat diusulkan yaitu:

H₂: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) mempunyai peranan penting terhadap pencegahan kecurangan, SPIP sangat berperan dalam hal pengawasan terhadap kebijakan dan aturan yang diterapkan pada sebuah organisasi terutama pada sebuah sistem yang telah diterapkan karena SPI adalah instrument pemerintah yang mempunyai job desk untuk mengontrol setiap kegiatan pada sektor publik (Tuanakotta, 2010:284) terlebih dalam hal *e-procurement* sehingga tujuan penerapan *e-procurement* agar pengadaan barang/jasa lebih transparan sehingga mengurangi kecurangan bisa tercapai. Berdasarkan uraian ini, maka hipotesis penelitian yang diusulkan yaitu:

H₃: Sistem pengendalian internal pemerintah terbukti memoderasi implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Dalam penerapan SPIP, komitmen organisasi sangat diperlukan sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dalam hal perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan bisa dilaksanakan semua pihak. Menurut Wibisono (2010) komitmen merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dimana menurut Usman (2010) komitmen adalah keterikatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Keberhasilan dalam tercapainya kebijakan pada organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Berdasarkan hal itu maka hipotesis penelitian yang diusulkan yaitu:

H₄: Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Banggai. Pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin dengan jumlah sampel yaitu 132 orang. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang menjadi pelaku pengadaan barang/jasa di tiap tiap OPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS), program yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah Warp PLS 6.0, dengan langkah-langkah evaluasi *outer model*, *inner model*, dan uji hipotesis. Oprasional varaiabel penelitian bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Matriks Operasional Variabel

| Variabel | Dimensi | Indikator |
|---|---|---|
| Implementasi <i>e-procurement</i> (Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012) | Proses Tahapan <i>e-procurement</i> | Persiapan Pengadaan |
| | | Pengumuman Pelelangan |
| | | Pendaftaran peserta lelang |
| | | Penjelasan pelelangan |
| | | Proses evaluasi |
| | | Lelang gagal dan pelelangan ulang |
| | | Pengumuman calon pemenang lelang |
| | | Sangah/Ketidak sepakatan pada hasil dari proses pemilihan |
| | | Pasca pengadaan |
| | Metode pelaksanaan <i>e-procurement</i> . | <i>E-tendering</i> |
| | | <i>E-Bidding</i> |
| | | <i>E-Catalok</i> |
| | | <i>E-Purchasing</i> |
| | | |

| | | |
|---|---|--|
| Komitmen Organisasi (Allen,1997) | Komitmen Efektif (<i>Affective Commitmen</i>) | Keterikatan emosional pegawai dengan organisasinya Keterlibatan diri dalam organisasi |
| | Komitmen Kontinu (<i>Continuance Commitmen</i>) | Persepsi atas kurangnya alternatif pekerjaan yang lain |
| | Komitmen normatif (<i>Normative commitmen</i>) | Tanggung jawab atas pekerjaan Memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan |
| Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008) | Lingkungan Pengendalian | Penegakan Integritas dan nilai etika |
| | | Komitmen terhadap kompetensi |
| | | Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat |
| | | Memiliki struktur Organisasi |
| | | Menetapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM |
| | Perwujudan peran aparat pengawas intern yang efektif | |
| | Penilaian Resiko | Identifikasi resiko |
| | Kegiatan Pengendalian | Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan |
| Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya | | |
| Informasi dan komunikasi | Memperbaharui sistem informasi secara terus menerus | |
| Pemantauan | Pemantauan berkelanjutan secara efektif atas sistem pengendalian intern | |
| Pencegahan <i>Fraud</i> (Karyono, 2013) | Teori <i>Triangle Fraud</i> | Mengurangi tekanan situasional yang menimbulkan fraud |
| | | Mengurangi kesempatan melakukan kecurangan |
| | | Memperkuat integritas pribadi |

(Sumber: Data diolah, 2020)

Hasil Dan Pembahasan

Evaluasi Outer Model

Hasil uji validitas dengan teknik PLS program warppls 6.0 menjelaskan implementasi *e-procurement* (X_1), komitmen organisasi (X_2), sistem pengendalian internal pemerintah (Z) dan pencegahan *fraud* (Y) adalah valid dengan menghapus pernyataan yang tidak memenuhi konvergent validity. Keseluruhan variabel dengan indikator dan pernyataan tersebut telah memenuhi konvergent validity dengan nilai loading diatas 0,50 dan *p-valuenya* <0,05. Uji realibilitas dapat dilihat dengan nilai *composite reability* diatas 0,70 dan *cronbach alpha* diatas 0,60 agar bisa reabilitas.

Tabel 2 Evaluasi *outer model*

| | X ₁ | X ₂ | Z | Y | Kriteria |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|
| Nilai <i>Composite Reliability</i> | 0,913 | 0,919 | 0,942 | 0,938 | >0.70 |
| Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> | 0,896 | 0,900 | 0,934 | 0,925 | >0.60 |

(Sumber : Data diolah, 2020)

Berdasarkan 143aria diatas bahwa nilai *composite reliability coefficients* untuk masing-masing 143variable memiliki nilai >0,70, dan *nilai 143variable alpha* untuk masing-masing 143variable memiliki nilai >0,60. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua 143variable dalam penelitian ini memenuhi realibilitas.

Evaluasi Inner Model

Hasil pengujian kecocokan model dengan analisis PLS program warppls 6.0 dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

| |
|---|
| Model fit and quality indices ----- Average path coefficient (APC)=0.250, P<0.001 Average R-squared (ARS)= 0.231, P=0.001 Average adjusted R-squared (AARS)= 0.269, P=0.000 Average block VIF (AVIF)=4.483, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.767, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 |
|---|

Gambar 1. Pengujian kecocokan model

(Sumber : Output model fit and quality indices warp PLS. 6.0)

Berdasarkan hasil pengujian kecocokan model pada gambar 1 dapat dilihat bahwa indeks *average path coefficient* (APC) sebesar 0.250 dengan nilai *p-value* sebesar < 0.001 kurang dari < 0.05. Indeks *average R— squared* (ARS) sebesar 0.231 dengan nilai *p-value* sebesar 0.001 kurang dari < 0.05. Nilai AVIF sebesar 4.483 < 5.0. Hasil pengujian tersebut memberikan makna bahwa kriteria pengujian kecocokan model dalam penelitian ini sudah terpenuhi, sehingga *inner model* dapat diterima.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis yang disajikan dalam tabel dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3. Hasil pengujian hipotesis

| Hipotesis | <i>p-values</i> | koefisien regresi (b) |
|----------------|-----------------|-----------------------|
| H ₁ | 0.01 | 0.19 |
| H ₂ | < 0.01 | 0.26 |
| H ₃ | 0.01 | 0.15 |
| H ₄ | <0.01 | 0.51 |

(Sumber : Data diolah, 2020)

Nilai *p-values* implementasi *e-procurement* lebih kecil dari taraf signifikansi (0.01 > 0.05). Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa implementasi *e-procurement* secara statistik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Banggai. Nilai *p-values* komitmen organisasi lebih kecil dari taraf signifikansi ($< 0.01 < 0.05$). Hasil tersebut memberikan makna bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Nilai *p-values* sistem pengendalian internal memoderasi implementasi *e-procurement* lebih kecil dari taraf signifikansi ($0.01 < 0.05$). Hasil tersebut memberikan makna bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi dengan memperkuat hubungan antara implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Nilai *p-values* sistem pengendalian internal memoderasi komitmen organisasi lebih kecil dari taraf signifikansi ($< 0.01 < 0.05$). Hasil tersebut memberikan makna bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi dengan memperkuat hubungan antara komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Pengaruh implementasi e-procurement terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai. Hasil pengujian tersebut memberikan arti bahwa implementasi *e-procurement* dapat mendorong peningkatan pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Banggai.

Dengan menerapkan sistem *e-procurement* pada proses pengadaan barang dan jasa maka dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kab. Banggai, dimana penggunaan sistem *e-procurement* pada proses pengadaan barang dan jasa lebih transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses pengadaan barang dan jasa lebih rasional, tidak diskriminatif, efektif dan efisien.

Temuan penelitian ini mendukung teori *triangle fraud* yang berpandangan bahwa kesempatan terjadinya kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan sistem yang efektif dan menjelaskan bahwa ruang lingkup *fraud* pengadaan barang/jasa dapat dipersempit melalui pengimplementasian sistem berbasis elektronik atau *e-procurement* di dalam suatu organisasi. Berdasarkan penelitian ini maka bisa disimpulkan bahwa pengimplementasian sistem *e-procurement* pada awal proses pengadaan barang/jasa sampai akhir dan metode pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Banggai sudah efektif dilaksanakan sehingga dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Akbar, et.al (2019), dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan/jasa. Artinya bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima, komitmen yang tinggi oleh pegawai pengadaan barang dan jasa pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat menekan terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi.

Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pegawai pengadaan barang/jasa di Kabupaten Banggai merasa ikut memiliki organisasi di tempat atau instansinya bekerja. Tingginya rasa memiliki tersebut mencerminkan komitmen karyawan yang besar sehingga mereka tidak akan bertindak/melakukan kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa karena merasa telah menjadi bagian dari organisasi. Hal tersebut senada dengan penelitian sebelumnya oleh Natasya (2017) dan Purwitasari (2019) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Pegawai yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan bekerja dan mengambil tindakan untuk kepentingan organisasi sehingga tidak akan timbul tindakan yang merugikan organisasi.

Temuan penelitian ini mendukung teori *triangle fraud* yang berpandangan bahwa dengan adanya komitmen terhadap organisasi maka akan mampu mengatasi masalah kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Pegawai yang berkomitmen terhadap organisasinya, apapun yang menjadi masalah internal dalam dirinya seperti tekanan akan kebutuhan, sikap rasionalisasi maka akan dapat dicegah dengan komitmen terhadap organisasi yang ada dalam dirinya. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi tidak akan memanfaatkan peluang (*opportunity*) untuk melakukan tindakan kecurangan, karena pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi berarti telah memahami bahwa ketika bekerja, tujuannya adalah kepentingan organisasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Semakin tinggi komitmen pegawai terhadap organisasi, maka akan menekan terjadinya tindakan kecurangan pada organisasi tersebut.

Pengaruh implementasi e-procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi dengan memperkuat hubungan antara implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai. Hasil pengujian tersebut memberikan arti bahwa interaksi antar variabel sistem pengendalian internal pemerintah dengan variabel implementasi *e-procurement* dapat meminimalisir adanya tindakan kecurangan (*fraud*).

Sistem pengendalian internal pemerintah dapat meningkatkan efektifitas pemanfaatan *e-procurement*, hal tersebut dibuktikan dengan tanggapan responden dengan nilai mean yang tinggi yang menyatakan bahwa pegawai di fasilitasi untuk meningkatkan kemampuannya dengan mengikutkannya dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat mendorong kemampuan karyawan sehingga mampu meningkatkan efektifitas pemanfaatan implementasi *e-procurement*. Dengan pemanfaatan *e-procurement* yang optimal maka tindakan kecurangan (*fraud*) pada kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir karena sistem penawaran dan pengadaan tidak lagi dilakukan secara manual yang dapat memberikan banyak cela untuk melakukan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitadewi (2012) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal dapat memoderasi terjadinya pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang tergolong baik akan lebih menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi berbagai tindakan *fraud*. Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran penting terhadap pencegahan fraud yaitu dalam hal control dan pengawasan terhadap kebijakan dan aturan

yang diterapkan pada suatu organisasi terutama pada sistem yang telah diterapkan dalam hal ini *e-procurement*.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori *fraud triangle*, dimana melalui sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mampu mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada sistem *e-procurement*. Semakin optimal penerapan pengendalian internal di dalam suatu instansi akan cenderung semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintahan melalui implementasi *e-procurement*.

Pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan pembuktian hipotesis menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi hubungan antara komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa pada lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Pelaksanaan sistem pengendalian internal perlu didukung dengan komitmen pegawai terhadap organisasi sehingga dapat menekan adanya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi.

Tanggapan responden terhadap variabel komitmen organisasi menunjukkan bahwa pegawai dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasa memiliki terhadap organisasi. Tingginya komitmen organisasi oleh pegawai dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dapat mendukung kelancaran pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Wibisono (2010) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Demikian juga Usman (2010) mengungkapkan bahwa komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori *fraud triangle*, dimana komitmen organisasi yang tinggi dan efektifnya sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mampu mengurangi adanya *pressure* (tekanan) dan mendorong karyawan untuk tidak memanfaatkan *opportunity* (kesempatan) untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa tingginya komitmen organisasi dan efektifnya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat mengurangi adanya tindakan kecurangan (*fraud*). Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa komitmen organisasi sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan akan dilaksanakan semua pihak sehingga akan berdampak pada perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, sehat dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kesimpulan

1. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel implementasi e-procurement, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan pencegahan fraud nilai mean berada pada kategori sangat baik.
2. Implementasi e-procurement berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
3. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
4. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi dengan memperkuat hubungan antara implementasi e-procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat memoderasi dengan memperkuat hubungan antara komitmen organisasi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. G., Rosidi, & Andayani, W. (2019). Pengaruh Implementasi E-procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dengan Budaya etis Organisasi sebagai variabel Moderasi. *Jurnal ekonomia*, Vol. No.1.69-81.
- Allen, M. D. (1997). *Commitment In The Workplace (Theory, Research and Application)*. Sage Publication London
- Firnanda, R., Muchamad, F., Lambang, P. P., & Haryono. U. (2019) Pengaruh Budaya Organisasi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan kecurangan dengan Pengendalian Internal sebagai variabel Moderasi. *Seminar Nasional Cendekiawan*. Vol.2 ISSN 2460-8696.
- Irawati, Adnan, R., Zulkifli, & Rahmat, S. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasional dan Pemberdayaan terhadap Kinerja Pegawai pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Volume 04, Nomor 02
- Jasin, M. (2010). *Mencegah Korupsi melalui E-procurement*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Karyono. (2013). *Forensik Fraud*. Yokyakarta
- Kurniawan, M. (2011). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja Organisasi Publik*. Demak. FE Universitas Diponegoro.
- Nuryanti, D. R. P. (2015). *Pengaruh Implementasi e-procurement dan pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan barang/Jasa*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan
- Puspitadewi. (2012). Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal *STIE Perbanas Surabaya* Vol.2, No.2, 159-172.
- Peraturan Presiden No. 70 Tahun .2012. Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Purwitasari, A. (2019). Pengaruh *Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey pada 5 rumah Sakit di Bandung)*. Skripsi, Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

- Romaissah, Sobrotul, I., & Rini, H. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan. *Neraca*, Vol 5 No 2
- Sularso, H., Dwiwiyati, A., & Putri, S. D. (2015). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa dan implikasinya terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakait Umum Daerah di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Fak. Ekonomi dan Bisnis Unsoed*. Vol 5. No.1.
- Sulaeman, A. (2016). *Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal dan E-procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Studi pada PT. PLN Persero Jawa Barat dan Banten)*. Thesis, Fakultas Ekonomi Unpas Bandung.
- Tuanakotta. T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta. LPFE UI
- Usman. K. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Wibisono. (2010). *Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Melalui Penerapan SPIP*. Warta Pengawasan. Volume XVII. No.2 Juni 2010.